



Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Menanamkan Nilai Kejujuran di Lingkungan Sekolah

J. Pauline Enggar Ningtyas, Syrilus Valentino Yonanta

Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Bandar Lampung

Email : eningtyas346@gmail.com, tinov616@gmail.com

Abstrak Korupsi ialah kasus sungguh- sungguh yang masih jadi penghambat utama pembangunan di Indonesia. Permasalahan ini tidak cuma terjalin di area pemerintahan, namun pula sudah memasuki ke bermacam bidang kehidupan, tercantum dunia pembelajaran. Dalam area pembelajaran di sekolah, salah satu wujudnya merupakan aplikasi suap, semacam pemberian suatu buat memperoleh nilai yang lebih baik ataupun perlakuan spesial. Apabila dibiarkan, Kerutinan tersebut bisa mengganggu nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta integritas pada diri siswa. Oleh sebab itu, pembelajaran anti korupsi butuh ditanamkan semenjak dini selaku salah satu upaya strategis buat menanamkan nilai kejujuran di area sekolah. Lewat pendidikan serta pembiasaan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan keadilan, siswa diharapkan sanggup menguasai berartinya berlagak adil serta menolak seluruh wujud suap. Kedudukan guru selaku teladan, pelaksanaan ketentuan sekolah yang tidak berubah- ubah, dan kerja sama antara sekolah serta keluarga jadi aspek berarti dalam membentuk kepribadian siswa yang berintegritas. Dengan demikian, pembelajaran anti korupsi bisa jadi langkah efisien dalam menghasilkan area sekolah yang bersih, jujur, serta menjunjung besar integritas dan meningkatkan pemahaman siswa hendak akibat negatif tindak korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Nilai Kejujuran, Karakter Siswa, Lingkungan Sekolah, Integritas

Abstrak Corruption is a serious issue that remains a major obstacle to development in Indonesia. This problem is not limited to the government sector; it has also permeated various aspects of life, including the education sector. In the school setting, one manifestation of this is the practice of bribery, such as offering something in exchange for better grades or special treatment. If left unchecked, such practices can undermine the values of honesty, responsibility, and integrity among students. Therefore, anti-corruption education must be instilled from an early age as a strategic effort to instill the value of honesty in schools. Through education and the cultivation of honest, disciplined, responsible, and fair behavior, students are expected to grasp the importance of acting fairly and rejecting all forms of bribery. The role of teachers as role models, the consistent enforcement of school regulations, and cooperation between schools and families are crucial aspects in shaping students' characters of integrity. Thus, anti-corruption education can be an effective step in creating a clean, honest school environment that upholds integrity and enhances students' understanding of the negative consequences of corruption in daily life.

Keywords : Anti-Corruption Education, Honesty Values, Student Character, School Environment, Integrity

1. Pendahuluan

Korupsi ialah kasus yang sampai dikala ini masih jadi atensi sungguh- sungguh di Indonesia sebab akibatnya yang sangat merugikan bermacam aspek kehidupan, semacam ekonomi, politik, hukum, serta sosial warga. Walaupun bermacam upaya pemberantasan sudah dicoba, aplikasi korupsi masih terus terjalin serta apalagi dalam sebagian keadaan mulai dikira selaku perihal yang biasa. Keadaan ini dipengaruhi oleh bermacam aspek, semacam lemahnya penegakan hukum, aplikasi nepotisme, minimnya transparansi, dan masih berkembangnya budaya suap di warga.

Kasus korupsi tidak cuma terjalin di area pemerintahan, namun pula mulai memasuki ke dunia pembelajaran, khususnya di area sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari, wujud sikap yang menuju pada aksi korupsi bisa nampak dari Kerutinan tidak jujur, semacam menyontek, memanipulasi kedatangan, menutupi kesalahan, sampai terdapatnya aplikasi pemberian suatu buat mendapatkan nilai ataupun perlakuan tertentu. Bila keadaan ini terus dibiarkan, hingga bisa berakibat pada menyusutnya nilai kejujuran, tanggung jawab, serta integritas siswa semenjak dini.

Perihal tersebut menampilkan kalau pemahaman siswa terhadap nilai-nilai kejujuran serta integritas masih butuh ditingkatkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya yang sistematis lewat pembelajaran buat menanamkan nilai-nilai anti korupsi semenjak dini. Pembelajaran anti korupsi tidak cuma berfokus pada uraian teori, namun pula pada pembuatan kepribadian lewat pembiasaan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, serta adil dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Tetapi demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pembelajaran anti korupsi di area sekolah masih belum berjalan secara maksimal. Masih ada bermacam hambatan, semacam minimnya uraian guru tentang pembelajaran anti korupsi, sedikitnya keteladanan dari orang berusia, dan belum konsistennya pelaksanaan ketentuan yang menunjang pembuatan kepribadian siswa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang relevan untuk memperoleh informasi mendalam, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis terkait dan visual yang berkaitan dengan objek penelitian, dan studi literatur dilakukan untuk menelusuri sumber akademik guna memperkuat analisis serta membandingkan hasil penelitian dengan kajian terdahulu.¹

3. Hasil Dan Pembahasan

Indonesia mengalami bermacam kasus terpaut tindak pidana korupsi. Aksi ini tidak cuma merugikan banyak pihak, namun pula cuma menguntungkan pelakunya. Korupsi biasanya berawal dari perilaku egois seorang yang lebih mementingkan kepentingan individu tanpa memikirkan akibatnya untuk orang lain. Bersumber pada Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pembelajaran Nasional Pasal 1 Ayat 14, pembelajaran anak umur dini ialah upaya pembinaan yang diperuntukan kepada anak semenjak lahir sampai umur 6 tahun. Pembelajaran ini bisa diselenggarakan lewat jalan

¹ Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.

resmi ataupun nonformal dengan membagikan rangsangan yang bertujuan menolong perkembangan serta pertumbuhan jasmani dan rohani, sehingga anak mempunyai kesiapan buat merambah jenjang pembelajaran berikutnya. Oleh sebab itu, pembelajaran anti- korupsi butuh ditanamkan semenjak dini supaya anak sanggup menguasai serta mempraktikkan nilai- nilai kepribadian yang baik. Salah satu nilai utama dalam membangun perilaku anti- korupsi merupakan kejujuran.

Dengan menanamkan nilai kejujuran, anak hendak terbiasa mengatakan serta berperan secara jujur, sehingga perilaku tersebut bisa tertanam kokoh serta tidak hadapi krisis di masa yang hendak tiba. Korupsi ialah salah satu wujud penyimpangan sikap yang dicoba dengan metode menyalahgunakan kekuasaan ataupun wewenang buat mendapatkan keuntungan individu ataupun kelompok. Aksi ini tidak cuma melanggar hukum, namun pula berlawanan dengan nilai- nilai moral serta etika dalam kehidupan bermasyarakat. Korupsi bisa terjalin dalam bermacam wujud, semacam suap, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan, dan manipulasi informasi.²

3.1 Pengertian Korupsi

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, korupsi adalah tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak dari korupsi sangat luas, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, dan hukum. Korupsi dapat menghambat pembangunan, meningkatkan kesenjangan sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik.

Selain itu, korupsi juga dapat dipandang sebagai akibat dari lemahnya nilai-nilai moral dalam diri individu. Seseorang yang tidak memiliki integritas cenderung lebih mudah melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga merupakan masalah karakter yang perlu ditangani melalui pendidikan sejak dini. Adapun istilah yang berkaitan dengan praktik korupsi dikenal dengan sebutan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur melalui kesepakatan tersembunyi, seperti pemberian uang atau fasilitas tertentu guna memperlancar suatu urusan. Sementara itu, nepotisme adalah perilaku melanggar hukum yang mengutamakan atau menguntungkan kepentingan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat dalam suatu jabatan atau keputusan.³

² Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pembelajaran Nasional

³ Hasan, Z. (2025). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung. Hlm. 3

3.2 Faktor Terjadinya Korupsi

Sebagai suatu peristiwa, korupsi tidak terjadi begitu saja. Ada faktor yang menjadikan terjadinya tindak pidana korupsi. Yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu meliputi:⁴

1. Faktor Internal

a. Sifat kepribadian yang rakus

Unsur penyebab korupsi pada pelaku dengan kepribadian yang rakus atau serakah itu datang dari dalam diri sendiri, biasanya di latar belakang keinginan untuk mendapatkan lebih dari yang seharusnya ia dapatkan.

b. Lemahnya akhlak dan moral

Seseorang yang melakukan korupsi memang sudah menyimpang dari ajaran moral. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik, bahkan dianggap tercela. Oleh karena itu, orang yang telah melakukan korupsi bisa dikatakan sebagai orang yang tidak berakhlak atau tidak bermoral.

c. Gaya hidup yang konsumtif

Perilaku konsumtif jika tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai dan adanya kesempatan yang datang akan membuka kesempatan seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi keinginannya. Salah satu kemungkinannya bisa jadi dengan korupsi.

d. Iman yang lemah

Orang-orang yang imannya lemah sangat rentan terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Landasan agama tiang utama dalam membentengi perilaku seseorang. Apabila iman seseorang kuat, maka mereka akan terhindar dari praktik-praktik semacam ini.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan. Dalam kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi sulit dalam hal ekonomi. Kesulitan itu membuka jalan bagi seseorang untuk berpikir mengambil jalan pintas seperti melakukan korupsi.

b. Faktor Organisasi

⁴Gabriella, N. S., dkk. (2024). Faktor-faktor penyebab yang menyebabkan perilaku tindak pidana korupsi di kalangan pegawai negeri. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(2).

Situasi ini terjadi karena beberapa aspek diantaranya kurang adanya disiplin dari sosok pemimpin, budaya organisasi yang salah, tidak ada transparansi dalam hal keuangan, dan manajemen yang tidak terurus dengan baik.

c. Faktor Politik

Politik juga merupakan salah satu penyebab banyak terjadinya korupsi. Kondisi ini dapat dilihat dari realitas politik dan kepentingan para pemegang kekuasaan tinggi. Adanya kasus suap menyuap uang juga sering terdengar oleh masyarakat. Perbedaan dan kompetisi politik menjadi salah satu penyebab korupsi, terutama di kalangan para elite politik. Umumnya, tuntutan kultur dan struktur korupsi betul-betul terwujud dalam perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan.

d. Faktor Perilaku masyarakat

Ketidak pedulian masyarakat akan praktik korupsi disekitarnya menjadi jalan mulus bagi para koruptor. Meskipun telah mengetahui praktik korupsi, banyak masyarakat yang cenderung ikut menutupinya karena kepentingan segelintir oknum. Masyarakat yang seperti inilah yang tidak merubah dan “melestarikan” tindakan korupsi. Selain itu, ada masyarakat kurang memahami bahwa sebenarnya mereka juga ikut andil dalam korupsi tersebut.

3.2 Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada individu, khususnya peserta didik. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas sehingga mampu menolak segala bentuk tindakan korupsi.⁵ Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, pendidikan anti korupsi tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mencakup pembentukan sikap dan perilaku melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Aspek kognitif berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai korupsi, termasuk pengertian, bentuk-bentuk, penyebab, serta dampak yang ditimbulkan. Melalui aspek ini, siswa diharapkan mampu memahami secara rasional mengapa korupsi merupakan tindakan yang merugikan dan harus dihindari. Aspek afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan yang dimiliki oleh siswa terhadap tindakan korupsi. Pada aspek ini, siswa diarahkan untuk memiliki sikap menolak korupsi serta menumbuhkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Aspek

⁵ Hasan, Z. (2025). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung. Hlm. 3

ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembentukan karakter dan moral siswa.⁶

Sementara itu, aspek psikomotorik berkaitan dengan tindakan nyata atau perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aspek ini, siswa diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi, seperti bersikap jujur saat ujian, tidak menyontek, disiplin dalam kehadiran, serta tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apa pun. Dengan pendekatan yang mencakup ketiga aspek tersebut, pendidikan anti korupsi diharapkan mampu membentuk generasi yang tidak hanya memahami bahaya korupsi secara teori, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

3.3 Nilai-Nilai Anti Korupsi

Nilai-nilai anti korupsi merupakan dasar penting dalam membentuk karakter individu yang berintegritas. Nilai-nilai ini perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan dalam pembelajaran di sekolah diantaranya adalah:

1. Kejujuran

Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik, nilai kejujuran dalam lingkungan sekolah yang dibumbui dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Jika ada siswa yang terbukti melakukan perilaku yang tidak jujur, baik pada lingkup sekolah maupun masyarakat, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai siswa tersebut. Sebagai ganjarannya siswa tersebut akan selalu mengalami kesulitan dalam bersosial dengan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan orang lain tidak nyaman karena selalu merasa curiga terhadapnya.

Nilai kejujuran inilah yang harus ditanamkan pada peserta didik di sekolah sebagai pondasi awal dalam mencegah perbuatan tindakan korupsi. Seseorang yang telah menetapkan sifat kejujuran dalam dirinya akan berusaha untuk terhindar dari perbuatan korupsi. Ia akan merasa bersalah apabila harus membohongi orang lain. Selain itu

⁶ Hasan, Z. (2025). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung. Hlm. 81

karena akan merugikan orang lain, dampak lain yang diterimanya saat melakukan perbuatan yang tidak jujur adalah kegelisahan psikis secara terus menerus.⁷

2. Kepedulian

Kepedulian berakar dari kata “peduli” yang berarti mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Sikap peduli memungkinkan seseorang untuk menghadapi berbagai kesulitan, menanggung setiap keadaan bersama, serta mencari solusi bagi keterbatasan yang ada. Inti dari kepedulian terletak pada pemahaman, penghargaan, dukungan, penghormatan, dan bantuan kepada sesama. Dengan demikian, kepedulian dapat diartikan sebagai sikap yang peka terhadap kondisi di sekitar dan perhatian terhadap sesama. Beberapa pendapat lain juga menyatakan bahwa peduli merupakan sikap keberpihakan yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam berbagai persoalan, keadaan, atau kondisi yang ada di sekitar lingkungan. Orang-orang yang peduli adalah mereka yang merasakan panggilan untuk menginspirasi, menciptakan perubahan, dan menyebarkan kebaikan. Kepedulian merupakan wujud cinta dan perlakuan terhadap orang lain sesuai dengan bagaimana seseorang ingin dicintai dan diperlakukan. Dengan sikap peduli ini, seseorang dapat menjadikan dunia sebagai tempat yang nyaman dan damai bagi setiap makhluk.

3. Disiplin

Disiplin yakni kebiasaan dan sikap yang konsisten terhadap suatu peraturan atau tata tertib tertentu. Hidup disiplin bukan berarti harus berkehidupan seperti pola militer, namun hidup disiplin bagi siswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk digunakan dengan baik dan bermanfaat serta untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun kegiatan di sekolah.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menerima dan menanggung segala akibat dari tindakan yang dilakukan, baik disengaja maupun tidak. Sikap ini diwujudkan dengan bekerja tekun, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta menjaga amanah yang diberikan. Tanggung jawab terbentuk melalui proses dan kebiasaan, dimulai dari hal-hal kecil seperti menepati janji dan mengembalikan barang pada tempatnya. Dengan latihan yang konsisten, sikap ini akan melekat dalam diri seseorang. Tanggung jawab juga mencerminkan kesadaran untuk melaksanakan tugas dengan komitmen, kemandirian, dan

⁷ Hasan, Z. (2025). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung. Hlm. 81

kepercayaan. Hal ini berlaku dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun lingkungan yang lebih luas. Dalam konteks antikorupsi, tanggung jawab berperan penting dalam membentuk pribadi yang berintegritas, menjaga kepercayaan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Sikap ini juga ditunjukkan melalui keberanian mengakui kesalahan dan menjadi pribadi yang dapat diandalkan.

5. Kerja Keras

Kerja keras berakar dari kemauan yang kuat, yang mencakup tekad, ketekunan, semangat, keberanian, dan sikap pantang menyerah. Sikap ini mencerminkan dedikasi dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab. Kerja keras adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan tanpa mudah menyerah hingga tujuan tercapai. Hal ini ditunjukkan melalui usaha yang konsisten, tidak menunda pekerjaan, serta kemampuan mencari solusi saat menghadapi hambatan. Kemalasan sering menjadi penghambat utama dalam menerapkan kerja keras. Individu yang memiliki sikap kerja keras akan memanfaatkan waktu secara optimal, tetap semangat, dan tidak mudah putus asa meskipun menghadapi kesulitan atau kegagalan. Mereka fokus pada hasil terbaik dan terus berusaha mencapai target secara maksimal. Menanamkan nilai kerja keras sangat penting karena dapat membentuk pribadi yang tangguh, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.⁸

3.4 Pendidikan Karakter dalam Lingkungan Sekolah

Pendidikan karakter merupakan proses pembentukan nilai, sikap, dan perilaku pada diri peserta didik agar menjadi individu yang berakhlak mulia. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral yang menjadi dasar perilaku siswa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter. Di lingkungan sekolah, pendidikan karakter dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti proses pembelajaran di kelas, keteladanan guru, kegiatan ekstrakurikuler, serta penerapan budaya sekolah yang positif. Lingkungan sekolah yang kondusif akan membantu siswa dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter secara lebih efektif.

⁸ Hasan, Z. (2025). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung. Hlm. 81-102

3.5 Peran Guru dalam Pendidikan Anti Korupsi

Keberhasilan dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi dipengaruhi oleh cara penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Untuk tidak menambah beban pembelajaran peserta didik, guru perlu memikirkan secara tepat bagaimana model dan pendekatan yang akan dipilih agar pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien. Ada beberapa model pembelajaran dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi yang bisa dilakukan oleh para guru yaitu:⁹

1. Peraturan Sekolah (Tata Tertib)

Tata tertib sekolah adalah kumpulan aturan yang disusun untuk menjaga keteraturan dan mengurangi perilaku tidak disiplin di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah membentuk akhlak yang baik, meningkatkan tanggung jawab, serta menanamkan ketaatan siswa terhadap peraturan. Tata tertib bersifat tertulis dan mengikat seluruh warga sekolah, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar jam belajar. Disiplin dalam tata tertib dipengaruhi oleh lingkungan, seperti pola asuh orang tua, guru, dan masyarakat. Individu yang disiplin mampu mengontrol diri serta mematuhi norma yang berlaku. Pembentukan disiplin dapat dilakukan melalui pembiasaan, penerapan aturan, sanksi, dan penghargaan. Penerapan tata tertib juga menjadi salah satu bentuk penanaman nilai pendidikan antikorupsi, misalnya melalui aturan larangan terlambat ke sekolah yang disertai sanksi tegas. Hal ini melatih sikap disiplin dan tanggung jawab peserta didik. Dengan demikian, tata tertib tidak hanya mengajarkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

2. Model melalui ekstrakurikuler

Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat dilakukan di luar pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan, misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Kelebihan model ini adalah peserta didik benar-benar mendapat nilai melalui pengalaman-pengalaman konkret. Siswa lebih terlibat dalam mengeksplorasi nilai-nilai dalam hidup dan proses

⁹ Wibowo, A. (2017). Peran guru dalam membangun karakter siswa melalui pendidikan antikorupsi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(2), 123–134.

belajar lebih menyenangkan. Kekurangan model ini tidak terstrukturnya pendidikan dan pengajaran di sekolah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dengan model ini siswa bisa menggali kreativitas dan pemahaman akan kebutuhan siswa secara mendalam dengan adanya pengawasan, dibutuhkan pendamping yang kompak dan bisa mengarahkan dalam menanamkan nilai. Kegiatan seperti ini tidak bisa dengan diadakan setahun sekali atau beberapa kali saja, tetapi harus berulang kali.¹⁰

3. Model pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas siswa

Penanaman nilai-nilai anti korupsi juga bisa ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh kegiatan di sekolah. Pembudayaan akan mewujudkan suatu pembiasaan. Untuk menciptakan budaya anti korupsi perlu strategi suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan yang positif akan menciptakan sosok manusia yang berkepribadian yang positif pula. Berdasarkan pembiasaan itulah muncul sikap siswa terbiasa menurut dan taat pada peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah dan sekitarnya, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di sekolah dampaknya juga terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti. Menanamkan kebiasaan yang baik memang tidak mudah butuh adaptasi dan juga membutuhkan waktu yang lama, namun sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sulit pula untuk diubah kembali. Dalam rangka menunjang praktik anti korupsi tersebut penanaman nilai anti korupsi dapat juga ditumbuhkan melalui kebiasaan dalam seluruh aktifitas di lingkungan sekolah.

3.6 Penguatan Nilai Kejujuran di Sekolah

Kejujuran perlu dikuatkan bukan hanya sebagai nilai teori, tetapi sebagai praktik nyata di lingkungan sekolah. Nilai kejujuran dapat ditanamkan melalui kebiasaan sehari-hari seperti tidak menyontek saat ujian, tidak memalsukan data kehadiran, tidak mencontek tugas, serta jujur saat mengakui kesalahan. Jika sekolah mampu menciptakan budaya jujur dihargai dan tidak jujur ditegur, maka siswa akan terbiasa memilih kejujuran meskipun ada godaan untuk curang. Selain itu, pemberian penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap jujur, adil, dan berintegritas dapat memperkuat pembelajaran anti korupsi karena menjadi motivasi internal dan eksternal bagi siswa lain. Dengan begitu, kejujuran tidak lagi dianggap kalah pintar dibandingkan cara instan, tetapi sebagai kualitas karakter yang dihormati.

3.7 Hambatan dan Tantangan Pendidikan Anti Korupsi

¹⁰ Wibowo, A. (2017). Peran guru dalam membangun karakter siswa melalui pendidikan antikorupsi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(2), 123–134.

Di sisi lain, implementasi pendidikan anti korupsi masih menghadapi beberapa hambatan, seperti: ¹¹

1. Kurangnya pemahaman guru tentang cara mengintegrasikan nilai anti korupsi secara alami ke dalam pembelajaran, bukan hanya dipaksa sebagai materi tambahan.
2. Minimnya dukungan fasilitas, waktu, dan anggaran untuk mengembangkan program ekstrakurikuler atau kegiatan antikorupsi yang berkelanjutan.
3. Sikap masyarakat yang kadang membiarkan kecurangan kecil misalnya menyontek, membeli jabatan, atau memaksa uang pangkal sehingga melemahkan nilai kejujuran yang diajarkan di sekolah.

Atas dasar itu, perlu komitmen kuat dari pihak sekolah, pemerintah daerah, dan KPK untuk memberikan pelatihan bagi guru, menyusun modul antikorupsi, dan menciptakan insentif bagi sekolah yang konsisten menanamkan nilai kejujuran.¹²

KESIMPULAN

Pendidikan karakter anti korupsi sangat penting untuk membentuk generasi yang bermoral dan berintegritas, karena korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga berkaitan dengan karakter seperti egoisme dan lemahnya nilai moral. Oleh karena itu, pendidikan ini perlu ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Nilai-nilai utama seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Peran guru sangat penting sebagai teladan sekaligus pembimbing dalam menanamkan sikap jujur dan adil kepada siswa. Namun, penerapan pendidikan ini masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya dukungan dan lingkungan yang masih mentolerir kecurangan kecil. Jika tidak diatasi, kebiasaan kecil tersebut dapat berkembang menjadi perilaku korupsi di masa depan. Oleh karena itu, kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan karakter anti korupsi.

¹¹ Sutrisno, Y. (2017). Pendidikan anti-korupsi di sekolah: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 10(2), 154–167.

¹² Sutrisno, Y. (2017). Pendidikan anti-korupsi di sekolah: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 10(2), 154–167.

SARAN

Pendidikan karakter anti korupsi sangat penting untuk membentuk generasi yang bermoral dan berintegritas, karena korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga berkaitan dengan karakter seperti egoisme dan lemahnya nilai moral. Oleh karena itu, pendidikan ini perlu ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Nilai-nilai utama seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Peran guru sangat penting sebagai teladan sekaligus pembimbing dalam menanamkan sikap jujur dan adil kepada siswa. Namun, penerapan pendidikan ini masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya dukungan dan lingkungan yang masih mentolerir kecurangan kecil. Jika tidak diatasi, kebiasaan kecil tersebut dapat berkembang menjadi perilaku korupsi di masa depan. Oleh karena itu, kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan karakter anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nur, W. R. (2021). *Inseresi nilai-nilai antikorupsi melalui pengembangan hidden curriculum di MIN 1 Banyumas*. Repository Universitas Ahmad Dahlan.
- Alfiyati, A. (2021). Implementasi program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 6(3), 289–302.
- Arliman, L. (2016). Konsep dan gagasan pengenalan pendidikan antikorupsi bagi anak dalam rangka mewujudkan generasi yang bebas korupsi. *Jurnal Lex Librum*, 3(1), 389–400.
- Astuti, N. (2020). Implementasi pendidikan karakter di sekolah: Membangun integritas dan anti-korupsi di kalangan siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 89–101.
- Burhanuddin, A. A. (2021). Strategi penanaman nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(2), 62.
- Gabriella, N. S., dkk. (2024). Faktor-faktor penyebab yang menyebabkan perilaku tindak pidana korupsi di kalangan pegawai negeri. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(2).
- Harahap, N. D., Sitompul, S., Firmansyah, E., Siregar, A., & Wulandari, A. (2023). Pentingnya pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. *Jurnal Ilmiah Pengabdian pada Masyarakat*, 2(1), 55–58.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Z. (2025). *Pendidikan antikorupsi*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Hasan, Z. (2025). *Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hasan, Z., & Saputri, W. (2024). Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan. *Journal of Social Science Research*, 4(6).

- Juliyanti, F., Azwar, B., & Fathurrochman, I. (2021). Integrasi nilai-nilai anti korupsi melalui sosialisasi pendidikan anti korupsi di lingkungan SMK. Dalam *Seminar Nasional Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* (hlm. 1–10).
- Kartika, S. (2022). Peran sekolah dalam membentuk karakter siswa dalam konteks antikorupsi. *Jurnal Pengembangan Pendidikan Karakter*, 16(1), 41–54.
- Lestari, D. (2019). Pendidikan karakter anti-korupsi: Peran guru dalam membentuk generasi berintegritas. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 11(3), 221–233.
- Montessori, M. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Demokrasi*, 11(1).
- Rosikah. (2023). *Pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap sikap dan perilaku anti korupsi peserta didik* (Skripsi). Universitas Sriwijaya.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Y. (2017). Pendidikan anti-korupsi di sekolah: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 10(2), 154–167.
- Wibowo, A. (2017). Peran guru dalam membangun karakter siswa melalui pendidikan antikorupsi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(2), 123–134.
- Wibowo, A. (2021). *Pendidikan anti korupsi di sekolah*. Yogyakarta: STIE Sultan Agung.